

**PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PAJAK RESTORAN, DAN
PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA LANGSA TAHUN 2015-2020**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**RANI APRILLIA
NIM 4022018090**



PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PAJAK RESTORAN, DAN
PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA LANGSA TAHUN 2015-2020**

Rani Aprillia
NIM. 4022018090

Dapat disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah

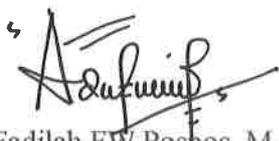
Langsa, 10 Mei 2022

Pembimbing I



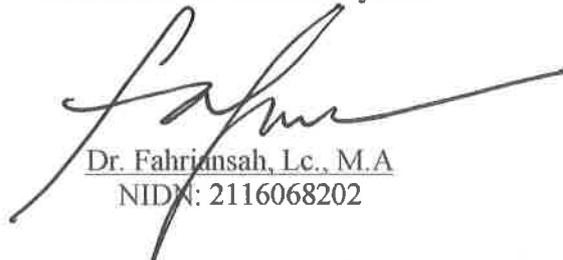
Zikriatul Ulya, M.Si
NIDN: 2024029102

Pembimbing II



Ade Fadilah FW Pospos, M.A
NIP: 198804072019032010

Mengetahui:
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Dr. Fahriansah, Lc., M.A
NIDN: 2116068202

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa tahun 2015-2020” an. Rani Aprillia, NIM 4022018090 Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 10 Mei 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah.

Langsa, 10 Mei 2022
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Langsa

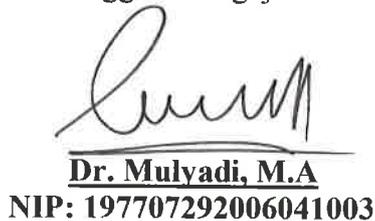
Ketua/Penguji I


Zikriatu Ulya, M.Si
NIPN: 2024029102

Sekretaris/Penguji II


Ade Fadilah FW Pospos, M.A
NIP: 198804072019032010

Anggota/Penguji III


Dr. Mulyadi, M.A
NIP: 197707292006041003

Anggota/Penguji IV


Juli Dwina Puspitasari, M.Bus
NIP: 198707062019032012

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa


Dr. Iskandar, M.CL
NIP 19650616 199503 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rani Aprillia
NIM : 4022018090
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa tahun 2015-2020

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, Maret 2022

Hormat saya,



Rani Aprillia

Motto

*Jika oranglain memandangmu berbeda. Yakinlah,
Allah selalu memandang sama hamba-hamba Nya*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pajak bumi dan bangunan, pajak restoran dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa tahun 2015-2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari tahun 2015-2020. Metode analisis data menggunakan persamaan regresi linier berganda, uji t, uji F dan uji koefisien determinasi (R^2). Hasil uji persamaan regresi linier berganda diketahui bahwa pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Kota Langsa tahun 2015-2020 sementara pajak restoran dan pajak reklame berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah di Kota Langsa tahun 2015-2020. Hasil uji t diketahui secara parsial pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Langsa tahun 2015-2020 sementara untuk pajak restoran dan pajak reklame tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Langsa tahun 2015-2020. Hasil uji F diketahui secara simultan pajak bumi dan bangunan, pajak restoran dan pajak reklame berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Langsa tahun 2015-2020. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) diperoleh sebesar 0,932 atau 93,2% pajak bumi dan bangunan, pajak restoran dan pajak reklame dapat menjelaskan pendapatan asli daerah sementara sebesar 6,8% dipengaruhi variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of knowing the effect of land and building tax, restaurant tax and advertisement tax on the local revenue of Langsa City in 2015-2020. This type of research is quantitative research using secondary data from 2015-2020. Methods of data analysis using multiple linear regression equation, t test, F test and test the coefficient of determination (R²). The results of the multiple linear regression equation test show that land and building taxes have a positive effect on local revenue in Langsa City in 2015-2020 while restaurant taxes and advertisement taxes have a negative effect on local revenue in Langsa City in 2015-2020. The results of the t-test are known that partially land and building taxes have a significant effect on local revenue in Langsa City in 2015-2020 while restaurant taxes and advertisement taxes do not significantly affect local revenue in Langsa City in 2015-2020. The results of the F test show that simultaneously land and building taxes, restaurant taxes and advertisement taxes have no significant effect on local revenue in Langsa City in 2015-2020. The results of the coefficient of determination (R²) obtained are 0.932 or 93.2% land and building tax, restaurant tax and advertisement tax can explain local revenue while 6.8% is influenced by other variables not included in this study.

Keywords: Land and Building Tax, Restaurant Tax, Advertising Tax, and Local Revenue

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT hanya kepada-Nya lah setiap insan berserah diri. Salawat dan Salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. yang merupakan rahmatan Lil Alamin yang mengeluarkan manusia dari zaman jahiliyah, menuju zaman peradaban yang islami. Semoga jalan yang dirintis beliau tetap menjadi penerang bagi perjalanan hidup umat manusia, sehingga ia selamat dunia akhirat. Skripsi dengan judul “Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa tahun 2015-2020”, tulisan ini menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh kesadaran, bahwa penulisan skripsi ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi penulis. Akan tetapi atas izin Allah SWT., dan bantuan serta doa dari semua pihak, maka semua kendala yang dihadapi penulis dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasi sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H. Basri Ibrahim, M.A, selaku Rektor IAIN Langsa
2. Bapak Dr. Iskandar Budiman, M.C.L, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
3. Bapak Fahriansyah Lc., M.A, selaku Ketua Jurusan dan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.

4. Bapak Fahriansyah, Lc., M.A., selaku Pembimbing I dan Ibu Ade Fadilah FW Pospos M.A, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing dan memberikan pengarahan selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan starf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat.
6. Ayah dan ibu yang memberikan dukungan moril maupun materil dan untaian doa-doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
7. Semua keluarga, yang telah membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.
8. Teman-teman yang tak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala keterbukaan dan ketulusan, skripsi ini penulis persembahkan dan semoga skripsi ini bermanfaat adanya, aamiin. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan tentu datangnya dari penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ilmiah yang berikutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb
Penulis

Rani Aprillia

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Perumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.6 Penjelasan Istilah	9
1.7 Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORITIS	11
2.1 Pajak	11
2.1.1. Pengertian Pajak	11
2.1.2. Ciri-ciri Pajak	12
2.1.3. Fungsi dan Karakteristik Pajak.....	14
2.1.4. Jenis Pajak	16
2.2 Pajak Bumi dan Bangunan	19
2.2.1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	19
2.2.2. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan	21
2.3 Pajak Restoran	22
2.3.1. Pengertian Pajak Restoran	22
2.3.2. Objek Pajak Restoran	23
2.4. Pajak Reklame	23
2.4.1. Pengertian Pajak Reklame	23
2.4.2. Subjek dan Obje Pajak Reklame	24
2.5 Pendapatan Asli Daerah	25
2.5.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	25
2.5.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah	25
2.5.3. Manfaat Pendapatan Asli Daerah	27
2.3 Penelitian Terdahulu	28
2.4 Kerangka Konsep	31
2.5 Hipotesis	31

BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1. Pendekatan Penelitian	33
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
3.3. Unit Analisis dan Horizon Waktu	33
3.4. Sumber Data Penelitian.....	34
3.5. Definisi Operasional Variabel.....	35
3.6. Teknik Analisis Data	37
3.7. Uji Asumsi Klasik.....	37
3.8. Metode Analisis Data.....	40
3.9. Uji t	41
3.10 Uji F	41
3.11 Uji Koefisien Determinasi.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	43
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	43
4.1.1. Gambaran umum Kota Langsa	43
4.1.2. Sejarah Kota Langsa.....	47
4.1.3. Visi dan Misi Kota Langsa.....	48
4.1.4. Deskripsi Data Penelitian	51
4.1.5. Dekriptif Data Penelitian.....	55
4.1.6. Hasil Uji Asumsi Klasik	57
4.1.7. Analisis Regresi Berganda	61
4.1.8. Hasil Uji t	63
4.1.9. Hasil Uji F	64
4.1.10. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	65
4.2 Pembahasan	65
4.2.1. Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah	65
4.2.2. Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapattan Asli Daerah	67
4.2.3. Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah	68
4.2.4. Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran, Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

DAFTAR TABEL

1.1	Pertumbuhan pendapatan Asli Daerah Kota Langsa	4
1.2	Pajak Bumi dan bangunan, Pajak Restoran, Pajak Reklame Kota Langsa.....	5
2.1	Penelitian Sebelumnya	28
3.1	Operasional Variabel	36
4.1	Pajak Bumi dan Banungan dan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa	51
4.2	Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa	53
4.3	Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa	54
4.4	Statistik Deskriptif Pajak Bumi dan Bangunan, Restoran dan Reklame	55
4.5	One Sample Kolmogorov Smirnov Test	58
4.6	Uji Multikolinearitas	59
4.7	Uji Autokorelasi	61
4.8	Hasil regresi Berganda	62
4.9	Hasil Uji t.....	63
4.10	Hasil Uji F	64
4.11	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	65

DAFTAR GAMBAR

1.1	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa.....	5
1.2	Pajak Bumi dan Bangunan, Restoran dan Reklame Kota Langsa.....	6
1.3	Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan, Restoran dan Reklame Kota Langsa.....	6
2.1	Kerangka Pemikiran	31
4.1	P-P Plot.....	60
4.2	Scatterplot.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

1	Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa	74
2	Output SPSS	75
3	Tabel t.....	80
4	Tabel F.....	81
5	Tabel Durbin Watson.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pemberlakuan otonomi daerah dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 23 Tahun 2014 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah (desentralisasi) untuk mengurus perekonomiannya sendiri. Otonomi daerah merupakan kewenangan dan kewajiban setiap daerah otonom yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

Pelaksanaan otonomi daerah menjadi penting untuk menuju pembangunan daerah yang lebih baik, karena untuk daerah-daerah yang ada di Indonesia saat ini harus dapat menggali dan mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial pada daerahnya sehingga dapat membiayai belanja daerah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain PAD yang sah (hasil dari badan usaha milik daerah dan jasa giro). Kewenangan dalam urusan keuangan daerah yang memberikan hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah yang ada menyebabkan pemerintah daerah berusaha menggali sumber-sumber perekonomian daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah.

Salah satu yang mempunyai peran penting dan berkontribusi terhadap

¹ Undang-undang No 2 tahun 2015 tentang otonomi daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagai mana telah diubah menjadin undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan kemudian diperbarui lagi menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.² Pajak dan retribusi daerah merupakan 2 sumber PAD, disamping penerimaan dari kekayaan daerah yang dipisahkan serta PAD lain-lain yang sah. Semakin tinggi peranan PAD dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Salah satunya adalah pendapatan dari pajak daerah, dimana mengenai pajak daerah ini ditetapkan berdasarkan peraturan daerah masing-masing dengan mengingat dan memandang kemampuan daerah dalam penarikan pajak untuk penerimaan daerah. Pajak daerah untuk tingkat Kabupaten dan Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan serta pajak bumi dan bangunan. Sementara retribusi terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

² Undang-undang No 8 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Pada penelitian ini khusus membahas pajak daerah berupa pajak daerah yang terdiri dari pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, dan pajak restoran. Pajak tersebut menjadi menarik untuk dilakukan penelitian karena di Kota Langsa yang merupakan kota jasa dan perolehan pajak daerah berupa pajak bumi dan bangunan yaitu adanya tanah (bumi) dan bangunan yang berdiri dan hal ini berpotensi dilakukan pemungutannya sehingga menghasilkan pendapatan bagi Kota Langsa. Pajak bumi dan bangunan sebelum tahun 2014 merupakan pajak yang disetorkan kepada pemerintah pusat atau menjadi pendapatan negara dan bukan pendapatan daerah. Tetapi kemudian tahun 2014 pajak bumi dan bangunan di limpahkan kepada masing-masing daerah kabupaten dan kota. Pelimpahan pajak bumi dan bangunan berdasarkan peraturan bersama menteri keuangan dan menteri dalam negeri No 213/PMK.07/2010 dan Nomor 5 tahun 2010 tentang persiapan pengalihan PBB sebagai pajak daerah dan dan pelaksanaannya paling lambat tanggal 1 Januari 2014 pajak bumi dan bangunan menjadi pendapatan daerah.

Selain pajak bumi dan bangunan terdapat juga pajak restoran yang terdiri dari restoran, rumah makan, café, warung kopi serta catering. Selain itu terdapat pula pajak reklame, dimana Kota Langsa banyak sekali terdapat papan-papan reklame baik yang di jalan-jalan (baleho) maupun di toko-toko. Pajak reklame juga menjadi sumber pendapatan bagi Kota Langsa. Kota Langsa terdapat banyak tempat penjualan makan dan minuman yang dan dapat menjadi sumber pendapatan bagi Kota Langsa.

Terdapatnya potensi daerah Kota Langsa dari sumber pajak daerah menjadi menarik dilakukan penelitian karena diharapkan pajak daerah berupa pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, dan pajak restoran memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa dan diharapkan akan dapat menjadi sumber belanja daerah Kota Langsa, sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Berdasarkan ungkapan Wakil Walikota Langsa pada tahun 2018 Kota Langsa mencapai perolehan Pendapatan Asli Daerah sebesar 94,35% yaitu Rp 118.539.060.604 dari target sebesar Rp 125.634.683.815.³ Sementara berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Irham, Bachri dan Halim bahwa pajak bumi dan bangunan berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah.⁴

Pajak reklame yang juga menjadi sumber pendapatan daerah Kota Langsa, juga diharapkan akan memberikan pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, berdasarkan penelitian Dewi, Djudi dan Nuzula pajak reklame berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang,⁵ sementara berdasarkan penelitian Vamiagustin, Suhadak dan Saifi pajak reklame berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu.⁶ Demikian pada pajak hotel dan pajak restoran yang memiliki potensi bagi Kota Langsa, sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa

³ <https://aceh.tribunnews.com/2019/01/04/realisasi-pad-langsa-tahun-2018-capai-94-persen-penerimaan-zis-salah-satu-sektor-yang-lewati-target>, diakses 20 Agustus 2021.

⁴ Irham, Bachri dan Halim, Pengaruh Pajak Bumi dan bangunan terhadap pendapatan Asli Daerah, *Jurnal Ekonomi*, Vol 3 No 1, 2011.

⁵ Dewi, Djudi dan Nuzula, Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Malang), *Jurnal Akuntansi*, Vol 6 No 2, 2016.

⁶ Vamiagustin, Suhadak dan Saifi, Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Batu tahun 2010-2012, *Jurnal Ekonomi & Binis*, Vol 4 No 1, 2014.

dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dapat diketahui sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa
Tahun 2015-2020

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)
2015	114.529.994.341	109.116.860.676
2016	133.420.175.265	125.369.467.375
2017	127.325.504.605	120.138.956.032
2018	125.634.683.815	121.316.713.328
2019	153.718.784.258	115.244.246.710
2020	159.592.856.511	123.277.867.970

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa, 2022

Berdasarkan tabel diketahui bahwa antara target (anggaran) Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, sementara tahun 2015 hingga tahun 2020 secara keseluruhan kurang dari 100% terutama di tahun 2019 hanya 74,97%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah belum maksimal.

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan, pajak restoran dan juga pajak reklame dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2
Pajak Bumi dan Bangunan, Restoran dan Reklame Kota Langsa
Tahun 2015-2020
(dalam Rupiah)

Tahun	Pajak Bumi dan bangunan		Pajak Restoran		Pajak Reklame	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2015	1.500.000.000	786.364.872	600.000.000	668.058.813	260.000.000	264.128.187
2016	1.700.000.000	1.763.926.576	680.000.000	688.643.543	300.000.000	222.428.159
2017	1.700.000.000	1.811.165.436	670.000.000	820.572.955	250.000.000	232.668.496
2018	1.700.000.000	1.718.360.997	670.000.000	691.632.282	300.000.000	268.047.661
2019	1.700.000.000	1.821.861.635	900.000.000	983.171.642	300.000.000	311.723.942
2020	1.600.000.000	1.561.620.002	660.000.000	628.120.579	235.000.000	263.784.116

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa, 2022

Tabel dan Gambar 1.2 menunjukkan bahwa terdapat realisasi lebih dari anggaran atau sesuai harapan yang setidaknya anggaran dapat terealisasi 100% bahkan lebih seperti pajak bumi dan bangunan tahun 2016-2019 realisasi melebihi anggaran yang ditetapkan, hal tersebut dikarenakan terdapat pajak bumi dan bangunan tahun sebelumnya tidak terbayar tetapi pada tahun bersangkutan membayar beserta dendanya. pajak restoran yang realisasinya melebihi anggaran terdapat di tahun 2017 dan 2019, hal ini dikarenakan pada tahun tersebut terdapat restoran atau sejenis yang memiliki penjualan tinggi dan meningkatnya jumlah pajak restoran yang diterima pemerintah daerah. Pada pajak reklame realisasi melebihi anggaran di tahun 2015, 2019 dan 2020, hal ini karena adanya pemungutan pajak reklame dan adanya kesadaran pemilik reklame (baleho, papan nama dan sejenisnya) melakukan kewajiban membayar pajaknya.

Tetapi tidak setiap tahun anggaran terealisasi dan kenyataannya baik pajak bumi dan bangunan tahun 2015 dan 2020 tidak terealisasi, karena kurang maksimalnya pemungutan pajak dan adanya wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran di tahun tersebut. Kemudian pajak restoran tahun 2020 mengalami tidak tercapainya realisasi dari anggaran yang ditetapkan yang disebabkan oleh pandemi dan berkurangnya pendapatan restoran dan sejenisnya sehingga mengurangi realisasi pajak restoran.

Pajak reklame umumnya terealisasi, tetapi kenyataannya terdapat juga yang tidak terealisasi seperti pajak reklame di tahun 2016-2018 anggaran tidak terealisasi. Hal tersebut karena adanya wajib pajak yang tidak membayarkan kewajiban pajak reklame, seperti salah satunya papan nama merek Nexian. Tidak

tercapainya atau tidak terealisasinya anggaran pajak bumi dan bangunan, pajak restoran dan pajak reklame menunjukkan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan melalui pajak belum maksimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan penelitian, bagaimana pengaruh dari pajak daerah (pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, pajak hotel serta pajak restoran) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa, dengan judul penelitian **“Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa tahun 2015-2020”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dideskripsikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa masih belum mencapai realisasinya berdasarkan anggaran yang ditetapkan.
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah dari Pajak untuk jenis pajak reklame masih lebih kecil jumlahnya dibandingkan restoran.
3. Pajak memberikan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa?

2. Apakah pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa?
3. Apakah pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa?
4. Apakah pajak bumi dan bangunan, pajak restoran serta pajak reklame secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa?

1.4. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa.
3. Untuk mengetahui pengaruh pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa.
4. Untuk mengetahui pengaruh pajak bumi dan bangunan, pajak restoran serta pajak reklame secara simultan terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain adalah:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang berguna bagi pembaca mengenai pajak dan pendapatan asli daerah.

b. Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.

2. Manfaat secara praktis

a. Memberikan informasi bagi Pemerintah Kota Langsa mengenai pajak bumi dan bangunan, restoran, reklame serta pendapatan asli daerah.

b. Memberi masukan kepada pemerintah daerah dalam menciptakan sumber-sumber pendapatan asli daerah.

1.6. Penjelasan Istilah

Terdapat beberapa istilah yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

1. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas bumi (tanah) dan bangunan yang dimiliki masyarakat.⁷
2. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.⁸
3. Pajak reklame yaitu pungutan yang dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame, reklame umumnya berisi informasi dengan ilustrasi yang menarik.⁹
4. Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.¹⁰

1.7. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika pembahasan dan pedoman penulisan.

⁷ Undang-undang No 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan

⁸ Pahala, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Bandung, Linda Karya, 2010) hal. 330

⁹ Peraturan Daerah No 12 tahun 2011, *Pajak Reklame*, Provinsi DKI Jakarta.

¹⁰ Halim, *Akuntansi Publik*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2014), hal. 67

Bab II Kajian Teoretis

Memaparkan mengenai pajak bumi dan bangunan, pajak restoran, pajak reklame, pendapatan asli daerah, penelitian terdahulu, Kerangka Konsep dan Hipotesis.

Bab III Metode Penelitian

Menguraikan mengenai Lokasi dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Identifikasi dan Operasionalisasi Variabel, Teknik Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang Gambaran Umum Objek Penelitian, Deskripsi Data Penelitian, Uji Persyaratan Analisis, Uji Hipotesis dan analisis peneliti.

Bab V Penutup

Berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Berbagai definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak agar mudah dipahami. Di bawah ini akan diuraikan definisi-definisi tersebut: Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan: Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dirujuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹¹ Mardiasmo menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.¹² Dari beberapa pendapat menurut para ahli diatas, maka pengertian pajak menurut penulis adalah kontribusi wajib pajak baik

¹¹ Siahaan, *Perpajakan*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2013) hal. 720

¹² Mardiasmo, *Dasar-dasar Perpajakan*, (Yogyakarta, Andi, 2010) hal. 21

orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Pendapat lain menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹³ Secara umum Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.¹⁴

2.1.2. Ciri-ciri Pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomi (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak menurut sebagai berikut:¹⁵

1. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Negara (pemungut

¹³ Sumitro, *Perpajakan*, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2011) hal. 31

¹⁴ Gade, Muhammad. 2008. *Teori Akuntansi*. (Jakarta: Almahira, 2014) hal. 109

¹⁵ Sumitro, *Perpajakan*, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2011) hal. 33

pajak/administrasi pajak).

3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
5. Berfungsi sebagai budgeter atau mengisi kas Negara/anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

Ciri-ciri pajak sebagai berikut: ¹⁶

1. Iuran rakyat kepada negara.
2. Berdasarkan Undang-Undang.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung ditujukan untuk pembangunan.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Sedangkan ciri-ciri pajak menurut pendapat lain seperti berikut: ¹⁷

1. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara;

¹⁶ Mardiasmo, *Dasar-dasar Perpajakan*, (Yogyakarta, Andi, 2010) hal. 19

¹⁷ Abunyami, *Perpajakan Pusat dan Daerah*, (Bandung, Humaira, 2015) hal. 98

3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah;
4. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari Negara kepada para pembayar pajak;
5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak;

2.1.3. Fungsi dan Karakteristik Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu: ¹⁸

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu: ¹⁹

¹⁸ Mardiasmo, *Dasar-dasar Perpajakan*, (Yogyakarta, Andi, 2010) hal. 23

¹⁹ Rudy, Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2010) hal. 61

1. Fungsi Penganggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Pengaturan (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang pemungutan dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Karakteristik Pajak Daerah adalah sebagai berikut: ²⁰

1. Dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
2. Pemungutan tersebut dilakukan dalam hal terdapat keadaan atau peristiwa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan Pajak Daerah.
3. Dapat dipaksakan pemungutannya, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana.
4. Tidak terdapat hubungan langsung atas pembayaran pajak daerah dengan imbalan atau jasa secara langsung.
5. Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.
6. Digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

2.1.4. Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak menurut yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: ²¹

²⁰ Zuraida, *Otonomi Daerah*, (Bandung, Alfabeta, 2016) hal. 44

²¹ Raudhatun, Wardhani dan Fadhlia Widha, Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan perkotaan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Timur, (Jurnal Jimeka, 2017)

1. Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.
 - b. Pajak tidak langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.
2. Menurut Sifat. Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak subjektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
 - b. Pajak objektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungut. Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Negara (pajak pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
 - b. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Jenis-jenis pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini

dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang tersebut ditetapkan jenis-jenis pajak daerah yaitu terdiri dari:

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuang. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagaimana di bawah ini.²²

²² Undang-undang No 28 tahun 2009

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2.2. Pajak Bumi dan Bangunan

2.2.1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Landasan Hukum Pajak Bumi dan Bangunan, adalah Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Selanjutnya Suandy menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat

kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan.²³ Ada empat asas utama yang harus diperhatikan dalam Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu:²⁴

- a. Sederhana, dengan pengertian mudah dimengerti dan dapat dilaksanakan.
- b. Adil, dalam arti keadilan vertikal maupun horizontal dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yang disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak.
- c. Mempunyai kepastian hukum, dengan pengertian bahwa pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan diatur dengan Undang-Undang dan peraturan atau ketentuan pemerintah sehingga mempunyai kekuatan dan hukum.
- d. Gotong-royong, dimana semua masyarakat baik berkemampuan rendah maupun tinggi ikut berpartisipasi dan bertanggung-jawab mendukung pelaksanaan Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan sertaketentuan Peraturan Perundang-undangan. Besarnya 20ndust Pajak Bumi dan Bangunan adalah 0,5% dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) sebagaimana telah ditentukan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Tarif (setengah persen) 0.5% merupakan pajak tunggal yang berlaku sama untuk semua jenis obyek pajak (persawahan, perkantoran, perkebunan, 20ndustry, dan sebagainya) diseluruh Indonesia. Dimana Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) besarnya presentasenya sebagaimana pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 Tentang penetapan besarnya NJKP untuk penghitungan PBB adalah sebagai

²³ Suandy, *Pajak Bumi dan Bangunan*, (Yogyakarta, Andi, 2012) hal. 2

²⁴ Undang-undang No 12 tahun 1994

berikut :²⁵

- 1) Objek pajak perkebunan adalah 40%
- 2) Objek pajak kehutanan adalah 40%
- 3) Objek pajak pertambangan adalah 40%
- 4) Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan) dengan ketentuan apabila NJOP nya > Rp 1.000.000.000,- adalah 40% dan apabila NJOP nya < Rp 1.000.000.000,- adalah 20%.

Menurut ketentuan undang-undang, Wajib Pajak adalah Subyek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Dengan demikian maka yang wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan bukan saja pemilik tanah dan atau bangunan tetapi juga penyewa atau siapa saja yang memanfaatkan tanah dan atau bangunan misalnya penghuni rumah dinas suatu instansi.²⁶ Sedangkan Objek Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.²⁷

2.2.2. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, subjek PBB adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata:²⁸

- a. Mempunyai suatu hak atas Bumi, dan/atau;
- b. Memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau;
- c. Memiliki menguasai atas Bumi, dan/atau;
- d. Memperoleh manfaat atas Bangunan.

²⁵ Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2002 tentang penetapan besarnya NJKP

²⁶ Siahaan, *Perpajakan*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2013) hal. 720

²⁷ Undang-undang No 12 tahun 1994

²⁸ Undang-undang No 28 tahun 2009

3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, objek PBB adalah:²⁹

a. Bumi

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.

b. Bangunan

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah jalan lingkungan, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, taman mewah dan menara.

2.3. Pajak Restoran

2.3.1. Pengertian Pajak Restoran

Pahala mengatakan bahwa Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.³⁰ Kemudian pendapat lain pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain.³¹ Dari pengertian yang disebutkan oleh para ahli peneliti menyimpulkan bahwa pajak restoran adalah pelayanan yang diberikan berupa makanan dan minuman baik dikonsumsi secara langsung ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

²⁹ Undang-undang No 28 tahun 2009

³⁰ Pahala, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Bandung, Linda Karya, 2010) hal. 330

³¹ Phaureula dan Iryani, *Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daeah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin*, (Jurnal Universitas Bakrie, 2016)

2.3.2. Objek Pajak Restoran

Pajak Daerah sebagai berikut:³²

1. Objek Pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
2. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

2.3.3. Subjek Pajak Restoran

Pajak Restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.³³

2.4. Pajak Reklame

2.4.1. Pengertian Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.³⁴ Berdasarkan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 26 dan 27, bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas

³² Pahala, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Bandung, Linda Karya, 2010) hal. 330

³³ *Ibid...* hal. 333

³⁴ Santoso, *Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung, Refika Aditama, 2014) hal 21

penyelenggaraan reklame.³⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil yang digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

2.4.2. Subjek dan Objek Pajak Reklame

Adapun Objek dan Subjek Pajak Reklame:

- a. Subjek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- b. Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) reklame papan billboard, videotron, megatron dan sejenisnya
 - 2) reklame kain
 - 3) reklame melekat, stiker
 - 4) reklame selebaran
 - 5) reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
 - 6) reklame udara
 - 7) reklame apung
 - 8) reklame suara
 - 9) reklame film/slide
 - 10) reklame peragaan

³⁵ Undang-undang No 28 tahun 2009

2.5. Pendapatan Asli Daerah

2.5.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, definisi dari Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁶ Pengertian Pendapatan Asli Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.³⁷

Pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil daerah lain yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi. Berdasarkan beberapa definisi di atas bahwa PAD merupakan pendapatan yang berasal dari semua penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah dan sumber lainnya yang dimiliki oleh daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk pelayanan masyarakat.³⁸

2.5.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:³⁹

³⁶ Undang-undang No 33 tahun 2004

³⁷ Halim A, *Manajmen Keuangan Sektor Publik*, (Jakarta, Salemba Empat, 2014) hal 86

³⁸ Yani A, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2009) hal 51

³⁹ Undang-undang No 33 tahun 2004

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah, meliputi:
 - a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - b. Jasa giro
 - c. Pendapatan bunga
 - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
 - e. Komisi, potongan, atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan / pengadaan barang dan / jasa oleh daerah.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain Penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan

oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah

Bagian Badan Usaha Milik Daerah ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Merupakan penerimaan selain yang disebutkan di atas tapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut Undang-Undang.

2.5.3. Manfaat Pendapatan Asli Daerah

Manfaat yang ingin dicapai tentunya digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. Hal ini berarti akan semakin memperbesar keleluasaannya daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas, dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Dengan pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan kegiatannya.⁴⁰ Pendapatan Asli Daerah adalah suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana dengan memberi manfaat dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi

⁴⁰ Yovita, *Akuntansi publik*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2015) hal 15

sumber keuangan daerahnya dengan tujuan untuk membiayai tugas dan tanggungjawabnya.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Nama dan Judul	Metode dan Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Fitra, Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang setelah dikeluarkannya Undang-undang Otonomi Daerah	Regresi Linier Berganda X_1 = Pajak Daerah X_2 = Retribusi Daerah Y = Pendapatan Asli Daerah Hasil penelitian diperoleh bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. ⁴¹	X = pajak daerah Y = pendapatan asli daerah	X = retribusi
2	Vamiagustin, Suhadak dan Saifi, Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Batu tahun 2010-2012).	Regresi Linier Berganda: X_1 = Pajak hotel X_2 = Pajak restoran X_3 = Pajak hiburan X_4 = Pajak reklame X_5 = Pajak penerangan jalan X_6 = Pajak parkir Y = Pendapatan Asli Daerah Hasil Penelitian diketahui bahwa pajak hotel, restoran,	X_1 = Pajak hotel X_2 = Pajak restoran X_3 = Pajak hiburan Y = Pendapatan Asli Daerah	X_4 = Pajak reklam e X_5 = Pajak penerangan jalan X_6 = Pajak parkir

⁴¹ Fitra Halkadri, *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang setelah dikeluarkannya Undang-undang Otonomi Daerah*, (Jurnal Praktik Bisnis. Vol 5 No 1, 2016)

No	Nama dan Judul	Metode dan Hasil	Persamaan	Perbedaan
		hiburan dan pajak penerangan jalan berpengaruh positif terhadap Pendapatan asli daerah sedangkan pajak reklame dan pajak parkir berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah. 42		
3	Safrita, Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura	Regresi Linier Berganda: $X_1 =$ Retribusi jasa umum $X_2 =$ Retribusi jasa usaha $X_3 =$ Retribusi perizinan tertentu $Y =$ Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian diketahui bahwa retribusi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. 43	$Y =$ Pendapatan Asli Daerah	$X_1 =$ Retribusi jasa umum $X_2 =$ Retribusi jasa usaha $X_3 =$ Retribusi perizinan tertentu
4	Irham, Bachri dan Halim, Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo	Regresi Linier sederhana: $X =$ Pajak bumi dan bangunan $Y =$ Pendapatan asli daerah. Hasil penelitian diperoleh pajak bumi dan bangunan berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah. 44	$X =$ Pajak bumi dan bangunan $Y =$ Pendapatan asli daerah.	$X_2 =$ pajak hotel $X_3 =$ pajak restoran

⁴² Vamiagustin, Suhadak dan Saifi, *Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Batu tahun 2010-2012)*, (Jurnal Administrasi Bisnis. Vol 14 No 2, 2014)

⁴³ Safrita, *Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura*, (Jurnal FUTURE. Vol 2 No 1, 2014)

⁴⁴ Irham, Bachri dan Halim, *Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo*, (Jurnal Equilibrium. Vol 1 No 1, 2011)

No	Nama dan Judul	Metode dan Hasil	Persamaan	Perbedaan
5	Wibowo, Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Penerimaan PAD pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu	Regresi Linier sederhana: X = Pajak restoran Y = Pendapatan Asli daerah Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah.. ⁴⁵	X = Pajak restoran Y = Pendapatan Asli	X_1 = Pajak bumi dan bangunan X_2 = Pajak hotel
6	Dewi, Djudi dan Nuzula, Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada DPAD Kota Malang)	X_1 = Pajak hotel X_2 = Pajak reklame Y = Pendapatan Asli Daerah Hasil penelitian diperoleh pajak hotel dan pajak reklame berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. ⁴⁶	X_1 = Pajak hotel Y = Pendapatan Asli Daerah	X_2 = Pajak reklame
8	Purba dan Ginting, Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah.	X_1 = Pajak Reklame X_2 = Pajak penerangan jalan Y = PAD Hasil penelitian diketahui pajak reklame berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah sedangkan pajak penerangan jalan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. ⁴⁷	Y = Pendapatan Asli Daerah	X_1 = Pajak Reklame X_2 = Pajak penerangan jalan

⁴⁵ Wibowo, Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Penerimaan PAD pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu (*Jurnal Mahasiswa Prodi Akuntansi UPP*: 2016)

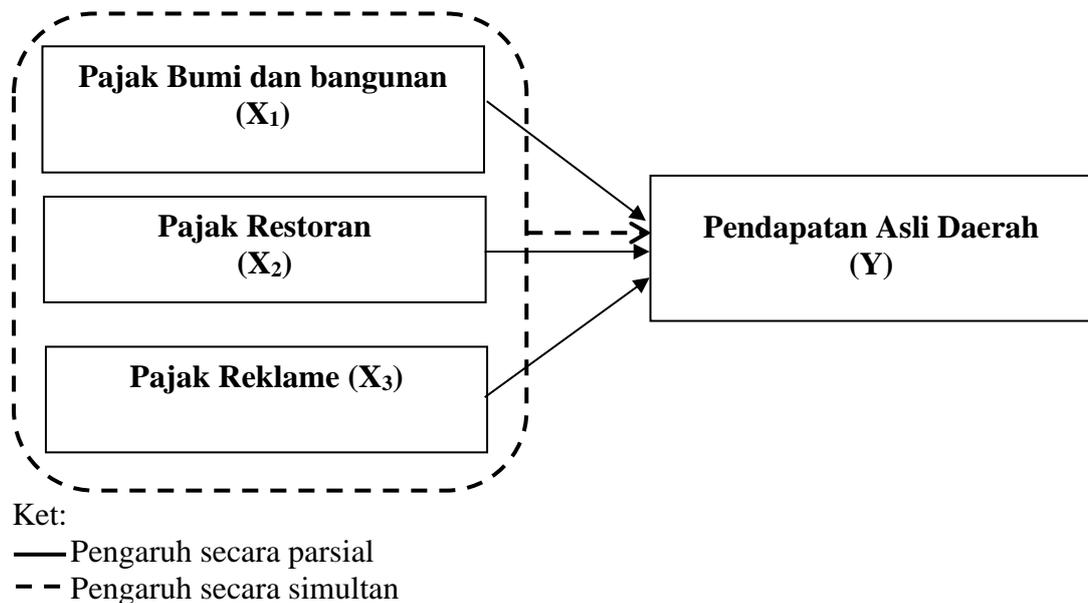
⁴⁶ Dewi, Djudi dan Nuzula, Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Malang) (*Jurnal Mahasiswa Perpajakan*: Vol 10 No 1, 2016)

⁴⁷ Purba dan Ginting, Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (*Jurnal Mutiara Akuntansi*: 2016)

No	Nama dan Judul	Metode dan Hasil	Persamaan	Perbedaan
9	Windi Agustina dan R Deden Adhianto, Pengaruh Pajak Bumi dan bangunan dan Pajak Penerangan jalan terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang	Regresi Linier sederhana : $X_1 = \text{PBB}$ $X_2 = \text{Pajak Penerangan Jalan}$ $Y = \text{Pendapatan Asli Daerah}$. Hasil penelitian diketahui bahwa retribusi perizinan tertentu berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. ⁴⁸	$Y = \text{PAD}$ dan PBB	$X = \text{pajak penerangan jalan}$

2.7 Kerangka Konsep

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



2.8. Hipotesis

Dalam suatu penelitian tentu memiliki hipotesis atau dugaan sementara, dan adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

⁴⁸ Windi Agustina dan R Deden Adhianto, Pengaruh Pajak Bumi dan bangunan dan Pajak Penerangan jalan terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang, (*Jurnal Ilmiah MEA*, Vol 5 No 2, 2021)

1. H_{01} : pajak bumi dan bangunan berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa.

H_{a1} : pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa.

2. H_{02} : pajak restoran berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa.

H_{a2} : pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa.

3. H_{03} : pajak reklame berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa.

H_{a3} : pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa.

4. H_{04} : pajak bumi dan bangunan, pajak restoran dan pajak reklame berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa.

H_{a4} : pajak bumi dan bangunan, pajak restoran dan pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian penjelasan (*explanatory research*) dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian penjelasan merupakan jenis penelitian dimana peneliti menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis, yaitu menguji hipotesis-hipotesis berdasarkan teori yang telah dirumuskan sebelumnya kemudian data yang telah diperoleh dihitung melalui pendekatan kuantitatif.⁴⁹ Penelitian kausal meneliti hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian kausal menjelaskan pengaruh perubahan variasi nilai dalam suatu variabel terhadap perubahan variasi nilai variabel lain. Dalam penelitian kausal, variabel independen sebagai variabel sebab dan variabel dependen sebagai variabel akibat.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada di Kota Langsa. Sedangkan waktu yang digunakan untuk penelitian ini mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.

3.3. Unit Analisis dan Horizon Waktu

Unit analisis dapat berupa individual, pasangan, kelompok, organisasi, dan kebudayaan. Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya. Penelitian ini untuk melihat Pendapatan Asli Daerah yang dipengaruhi oleh pajak bumi dan bangunan, pajak restoran dan

⁴⁹ Sugiyono , *Metodologi Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 61

pajak reklame pada pemerintah Kota Langsa.

Horizon waktu terbagi menjadi dua yaitu studi cross-sectional dan studi longitudinal. Sebuah studi yang dapat dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian disebut studi *one-shot* atau *cross-sectional*. Sebuah studi yang data variabel terikatnya dikumpulkan pada dua atau lebih batas waktu untuk menjawab pertanyaan disebut studi longitudinal. Horizon waktu yang digunakan dalam penelitian ini studi *one-shot* atau *cross-sectional*. Karena dalam penelitian ini data yang dikumpulkan hanya sekali yaitu data laporan realisasi fisik keuangan yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa tahun 2005-2020 maka horizon aktunya *one-shot* atau *cross sectional*.⁵⁰

3.4. Sumber Data Penelitian

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan baik kuantitatif yang menunjukkan fakta sehingga dapat memberi manfaat bagi peneliti atau memberi gambaran kepada peneliti tentang kondisi atau suatu keadaan.⁵¹

Jenis data berdasarkan sumbernya terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan, data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hal. 11

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2017) hal. 5

lain atau lewat dokumen.⁵²

Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran dari tahun 2015 sampai dengan 2020. Data yang digunakan berupa data-data yang terkait dengan pajak bumi dan bangunan, pajak restoran serta pajak reklame yang terdapat pada laporan realisasi anggaran pada Pemerintah Kota Langa guna kepentingan penelitian. Data penelitian diperoleh langsung dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa.

3.5. Definisi Operasional Variabel

Pada penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan yaitu variabel independen dan variabel dependen.

3.5.1. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen.⁵³ Variabel independen dalam penelitian ini adalah data pajak bumi dan bangunan (X_1), pajak restoran (X_2), pajak reklame (X_3).

3.5.2. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian konsumen yang diberi simbol (Y).⁵⁴ Variabel

⁵² *Ibid...* hal. 137

⁵³ *Ibid...* hal. 39

⁵⁴ *Ibid.* hal. 39

dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah.

Tabel 3.1
Operasional Variabel

No.	Operasional Variabel	Definisi	Satuan
1	Pajak bumi dan bangunan (X ₁)	Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah Kota Langsa atas bumi dan bangunan. ⁵⁵	Rupiah
2.	Pajak restoran (X ₂)	Pajak restoran adalah Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. ⁵⁶	Rupiah
3	Pajak reklame (X ₂)	Pajak reklame yaitu pungutan yang dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame, reklame umumnya berisi informasi dengan ilustrasi yang menarik. ⁵⁷	Rupiah
3.	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pendapatan asli daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. ⁵⁸	Rupiah

⁵⁵ Undang-undang No 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan

⁵⁶ Pahala, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Bandung, Linda Karya, 2010) hal. 330

⁵⁷ Peraturan Daerah No 12 tahu 2011, *Pajak Reklame*, Provinsi DKI Jakarta.

⁵⁸ Halim, *Akuntansi Publik*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2014), hal. 67

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil penelitian dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Proses analisis data yang dilakukan penelitian ini menggunakan tiga langkah yaitu :⁵⁹

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi kemudian tahap selanjutnya adalah *display* data atau penyajian data.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

3.7. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda. Tidak ada ketentuan yang pasti tentang urutan uji mana dulu yang harus dipenuhi. Proses uji asumsi klasik dilakukan bersama uji regresi.⁶⁰ Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang akan digunakan, yaitu:

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017) hal. 64

⁶⁰ Ansofino, *Buku Ajar Ekonometrika*, (Yogyakarta: Depublish, 2016), hal. 93

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui sebuah model regresi yaitu variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas dapat melihat grafik normal *P-P Plot of Regression Standardized Residual*. Deteksi dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik. Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas model regresi.⁶¹

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Apabila variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Multikolinieritas dapat juga dilihat dari⁶²: *Variance tolerance factor (VIF)*. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/\text{tolerance}$). Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan sebagai berikut: - Tolerance value $< 0,10$ atau $VIF > 10$: terjadi multikolinearitas. - Tolerance

⁶¹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS 21* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2016), hal. 10

⁶² *Ibid*, hal. 105

value $> 0,10$ atau VIF < 10 : tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.⁶³ Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual yang telah di studentized. Jika terlihat titik-titik pada grafik membentuk pola tertentu maka variabel independen tidak signifikan atau terjadi heteroskedastisitas, begitupun sebaliknya.⁶⁴

4. Uji Autokorelasi

Menurut Imam Ghazali, Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem autokorelasi.⁶⁵ Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi digunakan uji *Durbin Wastin* (DW) dengan kriteria sebagai berikut:⁶⁶

⁶³ *Ibid* hal. 139

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012) hal. 37

⁶⁵ *Ibid* hal. 110

⁶⁶ *Ibid* hal. 110

1. Jika $(4 - d) < dL$ maka terdapat autokorelasi
2. Jika $(4 - d) > dU$ maka tidak terdapat autokorelasi .
3. Jika $dL < (4 - d) < dU$ maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan.
4. $4 - du = d = 4 - dl$, berarti tidak ada autokorelasi negatif dan keputusannya *no desicison*.
5. $du < d < 4 - du$, berarti tidak ada autokorelasi positif atau negatif dan keputusannya tidak ditolak.

3.8. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linear berganda. Regresi ini digunakan untuk mengukur antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Menurut Sugiyono, analisis regresi linear berganda yaitu Analisis yang digunakan peneliti, bila bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).⁶⁷

Adapun rumus analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis-hipotesis adalah sebagai berikut: ⁶⁸

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Asli Daerah

a = Koefisien konstanta

⁶⁷ Sugiyono, *Statistik Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2018), hal.277

⁶⁸ *Ibid*, hal.277

b_1 b_2	= Koefisien regresi
x_1	= Pajak bumi dan bangunan
x_2	= Pajak restoran
x_3	= Pajak reklame
e	= <i>Error Term</i>

3.9. Uji t

Uji t-test (Uji secara Parsial)

Menurut Imam Ghozali, Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.⁶⁹

Pengambilan kesimpulan dalam pengujian ini sebagai berikut:

1. Dengan membandingkan nilai t_{tabel} dengan t_{hitung} .

Jika nilai $t_{tabel} > t_{hitung}$ maka H_a diterima dan H_o ditolak.

Jika nilai $t_{tabel} < t_{hitung}$ maka H_o diterima dan h_a ditolak.

2. Dengan menggunakan nilai signifikan

jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_o ditolak.

jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_o diterima dan H_a ditolak.

3.10. Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.⁷⁰

⁶⁹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS 21* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2016), hal. 98

⁷⁰ *Ibid.* hal. 98

Pengambilan kesimpulan dalam pengujian ini sebagai berikut: ⁷¹

1. Dengan membandingkan nilai F_{tabel} dengan F_{hitung} .

Jika nilai $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ maka H_a diterima dan H_o ditolak.

Jika nilai $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ maka H_o diterima dan H_a ditolak.

2. Dengan menggunakan nilai signifikan

jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_o ditolak.

jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_o diterima dan H_a ditolak.

3.11. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi sebagai ukuran untuk mengetahui kemampuan dari masing masing variabel yang digunakan. Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model yang dibentuk dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi (R^2) yaitu antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil mengindikasikan variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk dilakukannya prediksi terhadap variabel dependen. Adapun formula untuk menghitung koefisien determinasi adalah sebagai berikut: ⁷²

$$K_d = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

K_d = Koefisien determinasi

R^2 = Koefisien korelasi ganda

⁷¹ *Ibid.* hal. 98

⁷² Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS 21*(Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2016), hal. 97

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Kota Langsa

Kota Langsa berada pada titik koordinat antara 040 24'-35,68'-040 33 47'-0,3' Lintang Utara (LU) dan 97053' 14,59'-98004' 42,16' Bujur Timur (BT). Luas wilayah kota mencapai 239,83 kilometer persegi (km²), atau setara 0,41 persen dari luas wilayah Provinsi Aceh (57.365,57 km²) dengan batas Kota Langsa adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara adalah Selat Malaka
2. Sebelah selatan adalah Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur
3. Sebelah timur adalah Kabupaten Aceh Tamiang
4. Sebelah barat adalah Kabupaten Aceh Timur

Kota Langsa yang sedang tumbuh dan berkembang di Aceh, berbatasan langsung dengan 2 kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang serta dengan selat Melaka. Di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan bagian barat dengan Kabupaten Aceh Timur. Adapun di sebelah selatan kota berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Kedudukan kota yang berada di lintas jalan nasional di wilayah pantai timur Aceh, merupakan nilai strategis dan peluang yang perlu dimanfaatkan pertumbuhan ekonomi terbesar di wilayah pantai timur Aceh, dengan memanfaatkan peluang

strategis dari keberadaan daerah ketinggian dan kerendahan di sekitarnya, terutama di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang.

Kota Langsa terletak di daerah pesisir dan merupakan daerah yang berdekatan dengan Sumatera Utara serta berada di daerah perlintasan yaitu lintas timur yang menghubungkan kota-kota di pulau Sumatera. Kota Langsa pada saat dimekarkan hanya memiliki 3 kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Timur dan Kecamatan Langsa Kota. Kemudian seiring dengan perkembangan daerah perkotaan dan penambahan jumlah penduduk Kota Langsa di bagi menjadi 5 kecamatan. Kelima kecamatan tersebut dimekarkan pada tahun 2010 yaitu:

1. Kecamatan Langsa Timur
2. Kecamatan Langsa Kota
3. Kecamatan Langsa Barat
4. Kecamatan Langsa Lama
5. Kecamatan Langsa Baru

Wilayah Kota Langsa yang berada di perlintasan dan letaknya yang dekat dengan Ibukota Provinsi Sumatera Utara menjadikan daerah ini dapat dengan mudah menjalin kerjasama perdagangan dan jasa serta pengembangan wisata. Oleh karena itu sebagai wujud upaya menjadikan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah pantai timur Aceh, akan diupayakan penyediaan infrastruktur maupun fasilitas layanan pendukung sektor perdagangan, jasa dan pariwisata. Sektor pariwisata yang sudah berkembang saat ini dan banyak dikunjungi wisatawan dari daerah lain seperti dari

Sumatera Utara dan dari daerah Aceh Lainnya menjadikan perkenomian di Kota Langsa semakin baik. Selain daerah wisata Kota Langsa juga memiliki aktivitas ekonomi yang terus berkembang dan meningkat setiap tahunnya dengan perekonomian lebih banyak dari sektor perdagangan dan industri. Dengan demikian secara sektoral potensi sektor yang menjadi andalan dalam mendorong perekonomian kota Langsa dari sektor perdagangan. Dalam memanfaatkan peluang ekonomi sebagai kota transit di wilayah timur Aceh, terus diupayakan secara bertahap peningkatan fasilitas pendukung termasuk pembangunan pasar kota. Selain itu Kota Langsa saat ini sudah menjadi kota pendidikan yang dapat dilihat dari adanya 3 perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Samudra dan Institut Agama Islam Langsa, Akademi Keperawatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia serta perguruan tinggi swasta yang terdiri dari Universitas Sains Cut Nyak Dhien, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Pase Langsa, Akademi Kebidanan Harapan Ibu, Akademi Keperawatan Cut Nyak Dhien Langsa dan Lembaga Pendidikan Pengembangan dan Profesi Indonesia. Hal tersebut diharapkan dapat mengembangkan perekonomian kota Langsa.

Perkembangan perekonomian ini didukung dengan penduduk yang berkualitas dan produktif serta menjadikan tujuan utama dari pencapaian pembangunan yang diharapkan Pemerintah Kota. Kualitas penduduk yang meningkat serta berdaya saing tinggi akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pendayagunaan potensi sumberdaya ekonomi secara optimal dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, yang pada

akhirnya akan mewujudkan pencapaian taraf hidup masyarakat yang lebih sejahtera. Karena itu, potensi sumber daya manusia (SDM) masyarakat kota diharapkan lebih berdayaguna secara optimal dalam memainkan peran dan fungsi sosial kemasyarakatan serta berperan aktif dalam proses pembangunan. Apabila hal ini tidak dilakukan, dikhawatirkan keberadaan SDM tersebut justru menjadi beban dan dapat menghambat pembangunan di masa mendatang.

Perkembangan aktivitas ekonomi yang menunjukkan tren yang terus membaik di kota selama ini, dinilai ikut memiliki implikasi terhadap kecenderungan peningkatan jumlah penduduk kota dari tahun ke tahun. Perkembangan jumlah penduduk yang kian meningkat tersebut disebabkan oleh kenaikan angka kelahiran, di samping juga adanya migrasi masuk ataupun perpindahan penduduk dari daerah lain ke kota untuk menetap sekaligus mencari penghidupan yang lebih layak. Langsa termasuk kota yang sangat terbuka bagi masyarakat lain, termasuk dalam hal ini sebagai lokasi/tempat usaha dan berinvestasi bagi warga pendatang. Kondisi tersebut pula yang dimanfaatkan sebagai peluang bagi pendatang untuk terus menjalankan aktivitas ekonomi serta menetap di kota. Pada sisi lainnya, angka pertambahan jumlah penduduk tersebut tentunya perlu diikuti dengan upaya penyediaan lapangan kerja yang memadai, terutama bagi penduduk yang tergolong dalam usia ataupun angkatan kerja. Selain itu, bagi penduduk yang berusia sekolah harus pula mendapatkan akses pelayanan pendidikan yang berkualitas menurut jenjang pendidikan.

Distribusi dan sebaran jumlah penduduk kota relatif belum merata di setiap wilayah kecamatan. Secara rata-rata kepadatan jumlah penduduk di wilayah kota masih belum cukup merata atau sebanding dengan luas wilayah dari tiap kecamatan. Terdapat sejumlah kecamatan dengan wilayah yang relatif luas, namun belum diimbangi dengan kuantitas atau jumlah penduduk yang ada di kecamatan tersebut. Kondisi ini antara lain terlihat di wilayah Kecamatan Langsa Timur, di mana rata-rata kepadatan penduduk di kecamatan tersebut 180 jiwa/km². Wilayah yang relatif luas namun tidak diimbangi dengan jumlah penduduk yang memadai mengakibatkan tidak optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya ekonomi lokal (bps.kota Langsa).

Kemudian berdasarkan dukungan daerah wisata, daerah pendidikan diharapkan dapat mendukung perekonomian Kota Langsa. perekonomian ini juga didukung dengan adanya pendapatan daerah berupa pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah dari pajak hotel, pajak restoran, pajak sarang walet dan retribusi dari parkir, sampah, dan lainnya. Secara keseluruhan diharapkan dapat memberikan pendapatan untuk daerah.⁷³

4.1.2. Sejarah Singkat Kota Langsa

Pemerintah Aceh memiliki daerah tingkat kabupaten dan kota sebanyak 23 daerah. Dari 23 kabupaten dan kota tersebut, salah satunya adalah Kota Langsa. Kota Langsa sebelumnya adalah Ibukota dari Kabupaten

⁷³ kompas.com/bisniskeuangan/2016 diunduh 5 Mei 2021

Aceh Timur, kemudian seiring berjalannya kemajuan Kota Langsa di tahun 1991 diberi status oleh pemerintah Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Langsa.

Kota Administratif yang semakin maju dan terus berbenah diri serta berkaitan dengan bergulirnya otonomi daerah di tahun 1999, maka di tahun 2001 Kota Langsa menjadi sebuah pemerintahan Kota dengan Undang-Undang Nomor 3 tanggal 21 Juni 2001 dan diresmikan pada 17 Oktober 2001. Sebelumnya Kota Langsa adalah ibukota Kabupaten Aceh Timur yang kemudian dimekarkan menjadi pemerintahan Kota dan Kabupaten Aceh Timur dengan ibukota yang baru yaitu Idi Rayeuk.

4.1.3. Visi dan Misi Kota Langsa

Visi dan misi dari Kota Langsa yaitu.⁷⁴

Visi:

“Langsa Kota Jasa yang Berperadaban dan Islami”

Visi di atas akan dicapai melalui 10 misi yaitu:

1. Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah dengan lebih mendorong inisiatif dan partisipasi warga. Melalui misi 1 diharapkan akan terciptanya masyarakat Kota Langsa yang islami, Memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pelaksanaan dan memberikan dukungan penuh terhadap syariat Islam.

⁷⁴ <https://www.langsakota.go.id/visi-dan-misi/>, diunduh 21 Januari 2022

2. Melanjutkan penataan birokrasi pemerintahan, sinkronisasi dan harmonisasi kerjasama pembangunan yang lebih responsif, efektif dan efisien, transparan serta akuntabel yang berbasis *smart city* dalam rangka mendukung pelaksanaan e-government. Melalui misi 2 akan Terlaksananya pemerintahan yang bersih, amanah dan berwibawa di semua perangkat daerah serta Terjalannya kerjasama yang kuat antar lembaga dan antar wilayah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, serta Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.
3. Melanjutkan penataan kota untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, sehat, indah dan nyaman. Melalui misi 3 akan Tertatanya kota sesuai dengan rencana peruntukan lahan, Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau dan terkendalinya pencemaran serta Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan di semua tingkatan. Melalui misi 4 akan Terciptanya pemerataan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan Meningkatnya angka kelulusan yang memiliki SDM yang berdaya saing tinggi, Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah, serta Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan di semua tingkatan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Melalui misi 5 akan Terwujudnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal, Meningkatnya angka harapan hidup, Kemudahan akses layanan kesehatan serta Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan baik dasar maupun rujukan.

6. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Melalui misi 6 akan Terwujudnya kota layak anak, Meningkatnya indeks pembangunan gender, Terlindunginya perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Meningkatnya peran perempuan dalam bidang politik dan jabatan publik serta Meningkatnya pembinaan organisasi perempuan.
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur guna mendukung percepatan pembangunan dan pengembangan wilayah. Melalui misi 7 akan tersedianya infrastruktur daerah antara lain Terbangunnya jaringan jalan yang menghubungkan antar wilayah, Terbangunnya jaringan air bersih, jaringan irigasi, Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas perhubungan, Menurunnya titik rawan banjir, Tersedianya saluran drainase yang berfungsi dengan baik, serta Tersedianya infrastruktur lingkungan pemukiman penduduk yang berkualitas.
8. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui misi 8 diharapkan akan Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, Meningkatnya pendapatan per kapita penduduk, Meningkatnya produktivitas perekonomian melalui pemanfaatan sumber daya ekonomi yang tersedia, Meningkatnya jumlah kunjungan wisata, Terjaminnya kesejahteraan penduduk penyandang masalah sosial, serta Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan.
9. Mengembangkan olah raga, kesenian, dan kepemudaan. Melalui misi 9 akan Meningkatnya jumlah pemuda-pemudi yang berprestasi, Meningkatnya kegiatan pembinaan dan pemberdayaan pemuda,

Meningkatnya jumlah atlet berprestasi dari berbagai cabang olah raga, serta Terpeliharanya adat dan seni budaya daerah.

10. Memelihara serta meningkatkan keamanan, ketertiban umum dan stabilitas politik. Melalui misi 10 akan Terpeliharanya stabilitas politik dan keamanan daerah.

4.1.4. Analisis Data Penelitian

Penelitian ini terdiri dari variabel bebas (pajak bumi dan bangunan, pajak restoran, pajak reklame) dan variabel terikat (pendapatan asli daerah).

1. Pajak Bumi dan Bangunan serta Pendapatan Asli Daerah

Data pajak bumi dan bangunan Kota Langsa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.⁷⁵

Tabel 4.1
Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa
Tahun 2015-2020

Tahun	PBB (Rp)	PAD (Rp)	PBB (%)	PAD (%)
2015	786.364.872	109.116.860.676	8,3	15,3
2016	1.763.926.576	125.369.467.375	18,6	17,5
2017	1.811.165.436	120.138.956.032	19,1	16,8
2018	1.718.360.997	121.316.713.328	18,2	17,0
2019	1.821.861.635	115.244.246.710	19,3	16,1
2020	1.561.620.002	123.277.867.970	16,5	17,3
Jumlah	9.463.299.518	714.464.112.091	100,0	100,0

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa, 2022

⁷⁵ Badan Pengeola Keuangan Daerah Kota Langsa, 2022

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan bangunan atau PBB sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan terkecuali di tahun 2020 sedikit mengalami penurunan dari tahun 2019. Hal tersebut diketahui nilai PBB adalah sebesar Rp 1.561.620.002 sementara tahun sebelumnya nilai dari PBB lebih besar yaitu 1.821.861.635. Akan tetapi tahun 2020 PBB Kembali meningkat dengan persentase mencapai 17,3% dimana sebelumnya persentasenya adalah 16,1% selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Penurunan Pendapatan Asli Daerah yang terjadi di tahun 2017 dan tahun 2019 dikarenakan sumber-sumbernya yang lain mengalami penurunan sehingga berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah.

PBB sebagai salah satu sumber untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang turut menyumbang besaran PAD sejak tahun 2015-2020. PAD Kota Langsa tahun 2015 dan tahun 2017 serta tahun 2019 sedikit mengalami penurunan, sementara harapannya PAD terus meningkat sesuai dengan peningkatan sumber-sumbernya seperti PBB. Penurunan PAD di tahun 2015 tidak sama dengan PBB yang mengalami peningkatan tetapi terdapat sumber lain yang mengalami penurunan sehingga terjadi penurunan PAD dan demikian yang terjadi di tahun 2017, 2019.

2. Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah

Selain perkembangan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Langsa dapat juga diketahui perkembangan pajak restoran dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.⁷⁶

⁷⁶ Badan Pengeola Keuangan Daerah Kota Langsa, 2022

Tabel 4.2
Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa
Tahun 2015-2020

Tahun	Pajak Restoran (Rp)	PAD (Rp)	Pajak Restoran (%)	PAD (%)
2015	668.058.813	109.116.860.676	14,9	15,3
2016	688.643.543	125.369.467.375	15,4	17,5
2017	820.572.955	120.138.956.032	18,3	16,8
2018	691.632.282	121.316.713.328	15,4	17,0
2019	983.171.642	115.244.246.710	21,9	16,1
2020	628.120.579	123.277.867.970	14,0	17,3
Jumlah	4.480.199.814	714.464.112.091	100,0	100,0

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa, 2022

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pajak restoran sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan terkecuali di tahun 2018 dan tahun 2020 sedikit mengalami penurunan. Hal tersebut diketahui nilai pajak restoran adalah tahun 2018 sebesar Rp 691.632.282 sementara tahun sebelumnya nilai dari pajak restoran lebih besar yaitu Rp 820.572.955. demikian tahun 2020 sebesar Rp 628.120.579 sementara sebelumnya adalah sebesar Rp 983.171.642 atau persentasenya hanya 21,9% dibanding tahun 2019 adalah 14%.

Pajak restoran yang mengalami penurunan di tahun 2020 tidak sama dengan pendapatan asli daerah yang meningkat di tahun 2020. Peningkatan PAD di tahun 2020 bukan karena pajak restoran tidak memberi sumbangsih melainkan terdapat sumber PAD lain yang mendukung PAD di tahun 2020.

3. Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah

Perkembangan Pajak reklame Kota Langsa dapat juga diketahui dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut.⁷⁷

Tabel 4.3
Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa
Tahun 2015-2020

Tahun	Pajak Reklame (Rp)	PAD (Rp)	Pajak Reklame (%)	PAD (%)
2015	264.128.187	109.116.860.676	16,9	15,3
2016	222.428.159	125.369.467.375	14,2	17,5
2017	232.668.496	120.138.956.032	14,9	16,8
2018	268.047.661	121.316.713.328	17,2	17,0
2019	311.723.942	115.244.246.710	19,9	16,1
2020	263.784.116	123.277.867.970	16,9	17,3
Jumlah	1.562.780.561	714.464.112.091	100,0	100,0

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa, 2022

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa pajak reklame sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan terkecuali di tahun 2016, 2020 sedikit mengalami penurunan. Hal tersebut diketahui nilai pajak reklame adalah tahun 2016 sebesar Rp 222.428.159 sementara tahun sebelumnya nilai dari pajak restoran lebih besar yaitu Rp 264.128.187. demikian tahun 2020 sebesar Rp 263.784.116 sementara sebelumnya adalah sebesar Rp 311.723.942 atau persentasenya hanya 16,9% dibanding tahun 2019 adalah 19,9 %.

Pajak reklame yang mengalami penurunan di tahun 2020 sama dengan pendapatan asli daerah yang meningkat di tahun 2020. Peningkatan PAD di tahun

⁷⁷ Badan Pengeola Keuangan Daerah Kota Langsa, 2022

2020 karena pajak reklame juga memberi sumbangsih melain terdapat sumber PAD lain yang mendukung PAD di tahun 2020.

4.1.5. Deskriptif Data Penelitian

Deskriptif data penelitian merupakan bagian dari pemberian informasi data yang akan diteliti atau yang akan diolah. Pada penelitian ini sebagai variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi adalah pendapatan asli daerah. Kemudian variabel bebas terdiri dari pajak bumi dan bangunan, pajak restoran dan pajak reklame. Berikut dapat diketahui deskripsi statistik variabel penelitian.

Tabel 4.4
Statistik deskriptif Pajak Bumi dan Bangunan, Restoran dan Reklame
Tahun 2015-2020

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PBB	6	786364872,00	1821861635,00	1577216586,3333	398761913,05291
P. Restoran	6	628120579,00	983171642,00	746699969,0000	132683512,23358
P. Reklame	6	222428159,00	311723942,00	260463426,8333	31397000,63971
PAD	6	109116860676,00	125369467375,00	119077352015,1667	5954508815,41614
Valid N (listwise)	6				

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa, 2022

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa untuk variabel pajak bumi dan bangunan di Kota Langsa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 memiliki nilai terendah sebesar Rp 786.364.872 dan nilai tertinggi sebesar Rp 1.821.861.635 serta nilai rata-rata sebesar Rp 1.577.216.586 sementara nilai standar deviasi sebesar Rp 398.761.913. Dengan demikian maka dapat diketahui

bahwa nilai mean atau rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi yang menunjukkan bahwa sebaran data merata.

Berdasarkan table 4.4 juga diketahui bahwa untuk variabel pajak restoran di Kota Langsa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 memiliki nilai terendah sebesar Rp 628.120.579 dan nilai tertinggi sebesar Rp 983.171.642 serta nilai rata-rata sebesar Rp 746.699.969 sementara nilai standar deviasi sebesar Rp 132.683.512. Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa nilai mean atau rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi yang menunjukkan bahwa sebaran data merata.

Berdasarkan tabel 4.4 juga diketahui bahwa untuk variabel pajak reklame di Kota Langsa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 memiliki nilai terendah sebesar Rp 222.428.159 dan nilai tertinggi sebesar Rp 311.723.942 serta nilai rata-rata sebesar Rp 260.463.426 sementara nilai standar deviasi sebesar Rp 31.397.000. Dengan demikian dapat diketahui nilai mean atau rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi yang menunjukkan bahwa sebaran data merata.

Berdasarkan tabel 4.4 juga diketahui bahwa untuk variabel pendapatan asli daerah di Kota Langsa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 memiliki nilai terendah sebesar Rp 109.116.860.676 dan nilai tertinggi sebesar Rp 125.369.467.375 serta nilai rata-rata sebesar Rp 119.077.352.015 sementara nilai standar deviasi sebesar Rp 5.954.508.815. Dengan demikian dapat diketahui nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi dan menunjukkan sebaran data merata.

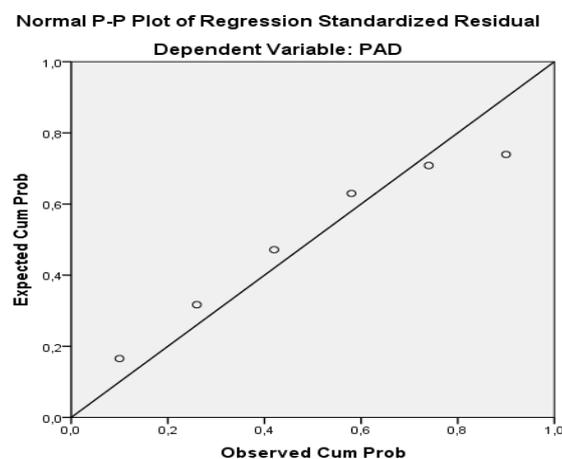
4.1.6. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik pada penelitian ini digunakan untuk menghasilkan regresi yang *best linier unbiased estimator* (BLUE) atau hasil pengujian baik, linier dan tidak bias diestimasi. Uji asumsi klasik pada penelitian ini terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas dan heterokedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Data yang baik digunakan dalam penelitian adalah data yang berdistribusi normal. Apabila data yang dihasilkan tidak berdistribusi secara normal maka tes statistik yang digunakan tidak valid. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan melihat grafik normal *P-P Plot of Regression Standardized Residual*. Deteksi dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik. Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas model regresi. Hasil uji sebagai berikut.

Gambar 4.1
P-P Plot



Sumber: output SPSS 21 (data diolah tahun 2022)

Kemudian didukung dengan uji one sample Kolmogorov smirnov test

Tabel 4.5
One Sample Kolmogorov Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		6
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0000048
	Std. Deviation	979999214,13357140
	Absolute	,200
Most Extreme Differences	Positive	,155
	Negative	-,200
Kolmogorov-Smirnov Z		,489
Asymp. Sig. (2-tailed)		,971

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: output SPSS, 21 (data diolah, tahun 2022)

Berdasarkan gambar 4.5 pengujian normalitas dengan menggunakan grafik normal *P-P Plot of Regression Standardized Residual* diketahui bahwa titik-titik plotting penyebaran data masih berada pada garis diagonal, sehingga asumsi normalitas untuk nilai residual dalam analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat terpenuhi. Demikian pula hasil uji one sample Kolmogorov smirnov test diperoleh nilai asymp sig lebih dari 0,05 yaitu 0,971 dan dapat dinyatakan asumsi normalitas terpenuhi.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas salah satu asumsi model regresi linier adalah tidak hanya korelasi yang sempurna atau korelasi yang tidak sempurna tetapi relatif sangat tinggi antara variabel-variabel bebas (independen). Adanya multikolinieritas sempurna akan berakibat koefisien regresi tidak dapat

ditentukan serta standart deviasi akan menjadi tidak terhingga.

Pengujian menggunakan nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF).

Hasil uji multikolinearitas sebagai berikut:

Tabel 4.6
Uji Multikolinearitas

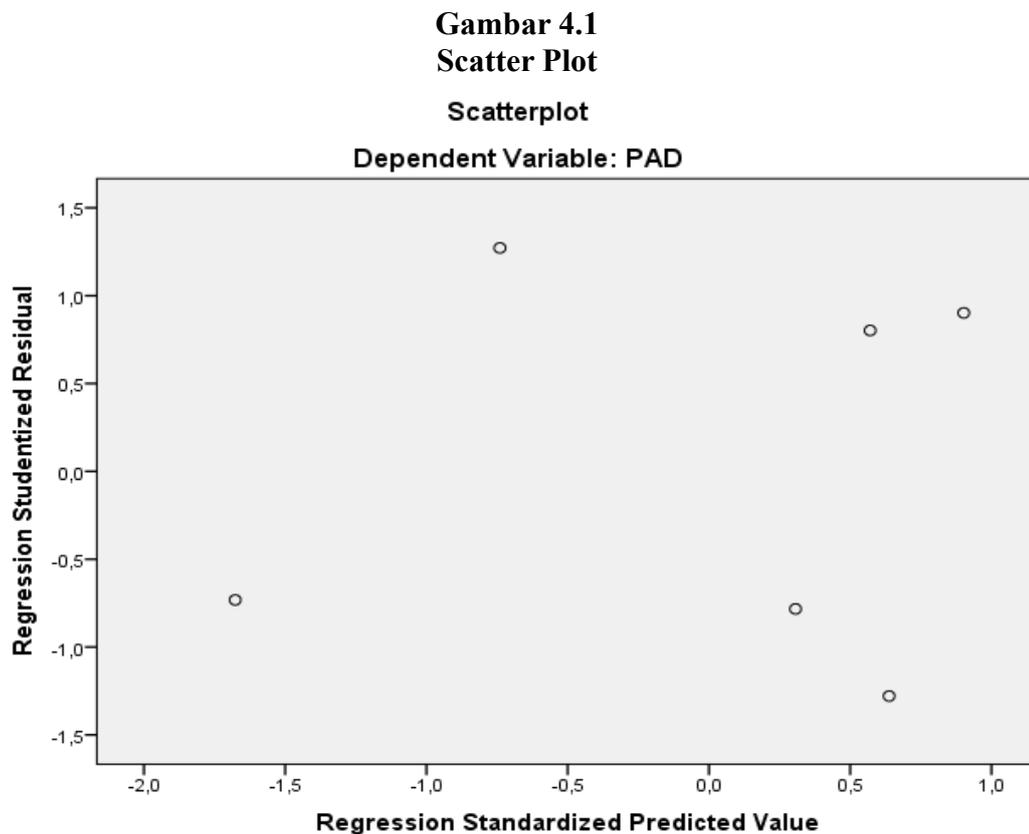
Model	Collinearity Statistics		Asumsi
	Tolerance	VIF	
(Constant)			
1 PBB	0,673	1,486	Tidak terjadi multikolinearitas
P. Restoran	0,480	2,082	Tidak terjadi multikolinearitas
P. Reklame	0,605	2,654	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: output SPSS, 21 (data diolah)

Tabel 4.6. dapat diketahui hasil uji multikolinearitas, terdapat nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai *variance Inflation Factor* (VIF) < 10 . Berdasarkan hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semua variabel independen yang terdiri PBB, Pajak restoran dan pajak reklame, tidak terdapat gejala multikolinieritas.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas asumsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual antara satu pengamatan yang lain. Jika varians dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain berbeda disebut heteroskedastisitas, sedangkan model yang baik adalah Uji dilakukan dengan grafik scatterplot.



Sumber: output SPSS, 21 (data diolah tahun 2021)

Berdasarkan gambar 4.2 dapat diketahui scatterplot dengan titik-titik tidak membentuk satu kumpulan melainkan berpencar dan berada di antara titik 0 sumbu Y. berdasarkan gambar tersebut maka dapat dinyatakan tidak terjadi heterokedastisitas pada data penelitian.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi asumsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi, dapat dilakukan uji statistik melalui uji Durbin-Watson (DW test), ini mempunyai masalah mendasar yaitu tidak diketahuinya

secara tepat mengenai distribusi dari statistik itu sendiri. Selanjutnya adalah membandingkan dengan tabel DW. Hasil uji autokorelasi dengan Durbin Watson sebagai berikut.

Tabel 4.7
Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,986 ^a	,973	,932	1549514811	1,876

a. Predictors: (Constant), P. Reklame, PBB, P. Restoran

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: output SPSS, 21 (data diolah)

Bedasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa:

$$DW = 1,876$$

$$dl = 0,61018 \text{ (diperoleh dari } t = 6, k = 3)$$

$$du = 1,40015$$

$$(4-dl) = 3,38982$$

$$(4-du) = 2,59985$$

$du < d < 4 - du$, yaitu $1,40015 < 1,876 < 2,59985$ berarti tidak ada autokorelasi positif atau negatif dan keputusan tidak ditolak.

4.1.7 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen pajak bumi dan bangunan, pajak restoran dan pajak reklame dan terhadap variabel dependen pendapatan asli daerah. Hasil regresi linier berganda sebagai berikut.

Tabel 4.8
Hasil Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	122014376386,818	6586214262,548		18,526	,003
1 PBB	15,436	2,118	1,034	7,286	,018
P. Restoran	-30,754	7,537	-,685	-4,081	,055
P. Reklame	-16,581	28,381	-,087	-,584	,618

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah
Sumber: output SPSS, 21 (data diolah)

Tabel 4.8. hasil regresi dapat dibuat hasil persamaan regresi berganda yaitu:

$$Y = 122014376386,818 + 15,436X_1 - 30,754X_2 - 16,581X_3$$

Dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 122014376386,818 adalah nilai pendapatan asli daerah pada saat variabel pajak bumi dan bangunan, pajak restoran dan pajak reklame dianggap nol, maka pertumbuhan ekonomi sebesar Rp 122.014.376.386,818.
2. Koefisien regresi variabel pajak bumi dan bangunan sebesar 15,436 dapat dinyatakan jika terjadi kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 1.000.000 maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar Rp 15.436.000, dengan asumsi variabel pajak restoran dan pajak reklame tetap atau tidak mengalami perubahan.
3. Koefisien regresi variabel pajak restoran sebesar -30,754 dapat dinyatakan jika terjadi kenaikan pajak restoran sebesar Rp 1.000.000 maka akan menurunkan pendapatan asli daerah sebesar Rp 30.754.000, dengan asumsi

variabel pajak bumi dan bangunan serta pajak reklame tetap atau tidak mengalami perubahan.

4. Koefisien regresi variabel pajak reklame sebesar -16,581 dapat dinyatakan jika terjadi kenaikan pajak reklame sebesar Rp 1.000.000 maka akan menurunkan pendapatan asli daerah sebesar Rp 16.581.000, dengan asumsi variabel pajak bumi dan bangunan serta pajak restoran tetap atau tidak mengalami perubahan.

4.1.8 Hasil Uji t

Pengujian secara parsial dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung pada tabel 4.10 dengan nilai t tabel ($n-k = 6-4 = 2$ pada $\alpha 5\% = 4,302$).

Tabel 4.9
Hasil Uji t

Model	T hitung	t tabel	$\alpha 5\%$	Sig.	Hasil
1 (Constant)	18,526			,000	
PBB	7,286	4,302	0,05	,018	Signifikan
P. Restoran	-4,081	4,302	0,05	,055	Tidak Signifikan
P. Reklame	-,584	4,302	0,05	,618	Tidak Signifikan

a. dependent variabel: Log pertumbuhan ekonomi

Sumber: output SPSS, 21 (data diolah tahun 2021)

Hasil uji dari tabel di atas dan nilai t tabel sebagai berikut:

1. Variabel pajak bumi dan bangunan diperoleh t hitung $>$ t tabel ($7,286 > 4,302$) dan t sig $<$ $\alpha 5\%$ ($0,018 < 0,05$) H_0 ditolak dan H_a diterima, dan dapat dinyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
2. Variabel pajak restoran diperoleh t hitung $>$ t tabel ($-4,081 < 4,302$) dan t sig

$> \alpha 5\%$ ($0,55 > 0,05$) H_0 ditolak dan H_a diterima, dan dapat dinyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

3. Variabel pajak reklame diperoleh t hitung $< t$ tabel ($-0,584 < 4,302$) dan t sig $> \alpha 5\%$ ($0,618 > 0,05$) H_0 diterima dan H_a ditolak, dan dapat dinyatakan bahwa pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

4.1.9 Hasil Uji F

Pengujian secara simultan dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel ($n-k = 6-4 = 2$ dan $k-1 = 4-1=3$ pada $\alpha 5\% = 19,16$).

Tabel 4.10
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	172478883865830 160000,000	3	574929612886100 54000,000	23,945	,040 ^b
	Residual	480199229851210 0400,000	2	240099614925605 0200,000		
	Total	177280876164342 250000,000	5			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

b. Predictors: (Constant), P. Reklame, PBB, P. Restoran

Sumber: output SPSS, 21 (data diolah tahun 2022)

Hasil perhitungan di atas bahwa F hitung lebih besar dari F tabel ($23,945 > 19,16$) dan F sig lebih kecil dari α ($0,04 < 0,05$), maka secara simultan variabel pajak bumi dan bangunan, pajak restoran dan pajak reklame mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah. Oleh karena itu

dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah.

4.1.10 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas (independen) dapat menjelaskan variabel terikat (dependen). Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.11
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,986 ^a	,973	,932	1549514811

a. Predictors: (Constant), P. Reklame, PBB, P. Restoran

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: output SPSS, 21 (data diolah tahun 2022)

Hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada tabel 4.11 diperoleh pada kolom *Adjusted R Square* (digunakan karena variabel bebas lebih dari 2 variabel) 0,932 atau 93,2%. Berdasarkan nilai koefisien determinasi maka dapat dinyatakan variabel pajak bumi dan bangunan, pajak restoran dan pajak reklame dapat menjelaskan variabel pendapatan asli daerah sebesar 93,2% dan sisanya sebesar 6,8% dijelaskan faktor-faktor lain yang tidak diestimasi pada penelitian ini.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pernyataan hipotesis pertama untuk H_{01} , yang menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan untuk H_{a1} , yang menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Besaran

koefisien regresi pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 15,436. Nilai signifikan untuk pajak bumi dan bangunan sebesar $0,018 < \alpha 0,05$. Hasil penelitian menunjukkan menerima hipotesis alternatif (H_{a1}). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak bumi dan bangunan maka akan semakin tinggi penerimaan pendapatan asli daerah.

Pajak bumi dan bangunan sebagai penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan sehingga dapat terus memberikan pengaruh untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Pajak bumi dan bangunan yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah termasuk di Kota Langsa bila semakin tinggi jumlah perolehannya akan memberikan nilai positif untuk peningkatan belanja daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah.

Semakin besar Kota Langsa memperoleh pendapatan asli daerah maka semakin mandiri dalam hal pemenuhan belanja daerah dan semakin kecil tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat dalam hal pemenuhan belanja daerah. Hal tersebut juga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya yang ada di Kota Langsa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitra Halkadri bahwa pajak daerah yang didalamnya termasuk pajak bumi dan bangunan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Padang, dan didukung penelitian Windi Agustina dan R Deden Adhianto, bahwa pajak bumi dan bangunan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

4.2.2. Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pernyataan hipotesis kedua untuk H_{02} , yang menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan untuk H_{a2} , yang menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Besaran koefisien regresi pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar -30,754. Nilai tidak signifikan untuk pajak restoran sebesar $0,055 > \alpha 0,05$. Hasil penelitian menunjukkan menerima hipotesis nol (H_{02}). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya pajak restoran maka akan semakin menurunkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa apabila pajak restoran semakin tinggi dan menjadi beban dari konsumen akan menurunkan keinginan masyarakat atau konsumen untuk berbelanja makanan di tempat-tempat makan karena harga dari makanan akan semakin tinggi. Hal tersebut akan menurunkan pendapatan dari pajak restoran dan menurunkan pendapatan asli daerah.

Pajak restoran yang ada di kota Langsa sebenarnya salah satu sumber untuk peningkatan pendapatan asli daerah tetapi jumlah penerimaannya perlu ditingkatkan oleh pemerintah Kota Langsa dengan menggali kembali sumber-sumber penghasilan pajak restoran termasuk di dalamnya pajak makan dan minuman pada usaha makanan di rumah seperti catering yang ada di Kota Langsa. Hal tersebut akan meningkatkan jumlah pendapatan dari pajak restoran. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wibowo bahwa pajak restoran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh pajak restoran yang negatif terhadap pendapatan asli daerah pada penelitian Wibowo dikarenakan nilai pajak restoran pada tahun penelitian mengalami penurunan.

4.2.3. Pengaruh Pajak Reklame terhadap Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pernyataan hipotesis ketiga untuk H_{03} , yang menyatakan bahwa pajak reklame berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan untuk H_{a3} , yang menyatakan bahwa pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Besaran koefisien regresi pengaruh pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar -16,581. Nilai tidak signifikan untuk pajak reklame sebesar $0,584 > \alpha 0,05$. Hasil penelitian menunjukkan menerima hipotesis nol (H_{03}). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya pajak reklame maka akan semakin menurunkan pendapatan asli daerah.

Pajak reklame yang tinggi menjadikan beban pada perusahaan dengan reklamennya seperti pada papan billboard, spanduk dan papan nama toko. Hal tersebut menurunkan minat untuk membuat reklame pada setiap usaha yang ada di Kota Langsa dan akan menurunkan penerimaan pajak reklame. Sehingga pajak reklame berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sebenarnya pajak reklame merupakan sumber dari pendapatan asli daerah hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah bersumber dari salah satunya adalah pajak daerah yang terdiri dari pajak restoran, bumi dan bangunan serta reklame. Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian Purba dan Ginting, dimana variabel penelitiannya untuk pajak reklame tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pengaruh pajak restoran yang negatif terhadap pendapatan asli daerah pada penelitian Purba dan Ginting dikarenakan nilai pajak reklame nilainya masih rendah.

4.2.4. Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran, Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pernyataan hipotesis keempat untuk H_{04} , yang menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan, pajak restoran dan pajak reklame berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan untuk H_{a4} , yang menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan, pajak restoran dan pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Nilai signifikan untuk pajak bumi dan bangunan, pajak restoran, pajak reklame sebesar $0,040 < \alpha 0,05$. Hasil penelitian menunjukkan menerima hipotesis alternatif (H_{a4}). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya pajak bumi dan bangunan, pajak restoran dan pajak reklame dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hal ini berarti pajak bumi dan bangunan, pajak restoran dan pajak reklame bila digabungkan menjadi satu akan memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Kemudian sesuai dengan Undang-undang bahwa sumber pendapatan asli daerah dapat berupa pajak bumi dan bangunan, pajak restoran, pajak reklame. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitra Halkadri bahwa pajak daerah memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Serda penelitian Vamiaagustin, Suhadan dan Saifi bahwa pajak restoran, pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan.

1. Hasil pengujian hipotesis pertama dengan menerima hipotesis alternatif (H_{a1}), bahwa pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dari hasil penelitian ini dapat diprediksi jika nilai pajak bumi dan bangunan terus naik, maka akan memperbesar pengaruhnya pada pendapatan asli daerah yang signifikan.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua dengan menerima hipotesis nol (H_{o2}), bahwa pajak restoran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dari hasil penelitian ini dapat diprediksi jika pajak restoran terus naik, maka akan menurunkan pengaruhnya pada pendapatan asli daerah tetapi tidak signifikan. Hasil dapat disimpulkan bahwa tingginya pajak restoran menurunkan pendapatan asli daerah tetapi tidak signifikan.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga dengan menerima hipotesis nol (H_{o3}), bahwa pajak reklame berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dari hasil penelitian ini dapat diprediksi jika pajak reklame terus naik, maka akan menurunkan pengaruhnya pada pendapatan asli daerah tetapi tidak signifikan. Hasil dapat disimpulkan bahwa tingginya pajak reklame menurunkan pendapatan asli daerah tetapi tidak signifikan.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat dengan menerima hipotesis alternatif (H_{a4}), bahwa pajak bumi dan bangunan, restoran dan pajak reklame

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dari hasil penelitian ini dapat diprediksi jika pajak bumi dan bangunan, pajak restoran dan pajak reklame terus naik, maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

5.2. Saran

Saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. Bagi para akademisi khususnya mahasiswa dapat kiranya menggunakan hasil penelitian sebagai referensi penelitian yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah yang dipengaruhi oleh pajak bumi dan bangunan, pajak restoran dan pajak reklame.
2. Kepada pemerintah Kota Langsa sebaiknya pendapatan asli daerah terus ditingkatkan perolehannya melalui sumber-sumbernya yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak restoran dan pajak reklame dengan memaksimalkan pemungutannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abunyami, *Perpajakan Pusat dan Daerah*, Bandung, Humaira, 2015
- Ansofino, *Buku Ajar Ekonometrika*, Yogyakarta: Depublish, 2016
- Badan Pengeola Keuangan Daerah Kota Langsa, 2022
- Dewi, Djudi dan Nuzula, Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Malang) *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*: Vol 10 No 1, 2016
- Fitra Halkadri, *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang setelah dikeluarkannya Undang-undang Otonomi Daerah*, Jurnal Praktik Bisnis. Vol 5 No 1, 2016
- Gade, Muhammad. 2008. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Almahira, 2014
- Halim A, *Manajmen Keuangan Sektor Publik*, Jakarta, Salemba Empat, 2014
- <https://aceh.tribunnews.com/2019/01/04/realisasi-pad-langsa-tahun-2018-capai-94-persen-penerimaan-zis-salah-satu-sektor-yang-lewati-target>, diakses 20 Agustus 2021
- <https://www.langsakota.go.id/visi-dan-misi/>, diunduh 21 Januari 2022
- Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS 21*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2016
- Irham, Bachri dan Halim, Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo, *Jurnal Equilibrium*. Vol 1 No 1, 2011
- Irham, Bachri dan Halim, Pengaruh Pajak Bumi dan bangunan terhadap pendapatan Asli Daerah, *Jurnal Ekonomi*, Vol 3 No 1, 2011
- kompas.com/bisniskeuangan/2016 diunduh 5 Mei 2021
- Mardiasmo, *Dasar-dasar Perpajakan*, Yogyakarta, Andi, 2010
- Pahala, *Manajemen Keuangan Daerah*, Bandung, Linda Karya, 2010
- Peraturan Daerah No 12 tahu 2011, *Pajak Reklame*, Provinsi DKI Jakarta
- Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2002 tentang penetapan besarnya NJKP
- Phaureula dan Iryani, *Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daeah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin*, Jurnal Universitas Bakrie, 2016
- Purba dan Ginting, Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah *Jurnal Mutiara Akuntansi*: 2016

- Raudhatun, Wardhani dan Fadhlia Widha, Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan perkotaan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Timur, *Jurnal Jimeka*, 2017
- Rudy, Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2010
- Safrita, *Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura*, *Jurnal FUTURE*. Vol 2 No 1, 2014
- Santoso, *Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, Refika Aditama, 2014
- Siahaan, *Perpajakan*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2013
- Suandy, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Yogyakarta, Andi, 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung : Alfabeta, 2017
- Sugiyono, *Statistik Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2018
- Sumitro, *Perpajakan*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2011
- Undang-undang No 12 tahun 1994
- Undang-undang No 28 tahun 2009
- Undang-undang No 33 tahun 2004
- Undang-undang No 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan
- Undang-undang No 2 tahun 2015 tentang otonomi daerah
- Undang-undang No 8 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- Vamiagustin, Suhadak dan Saifi , *Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Batu tahun 2010-2012)*, *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol 14 No 2, 2014
- Wibowo, Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Penerimaan PAD pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, *Jurnal Mahasiswa Prodi Akuntansi UPP*: 2016
- Windi Agustina dan R Deden Adhianto, Pengaruh Pajak Bumi dan bangunan dan Pajak Penerangan jalan terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang, *Jurnal Ilmiah MEA*, Vol 5 No 2, 2021
- Yani A, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009
- Yovita, *Akuntansi publik*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- Zuraida, *Otonomi Daerah*, Bandung, Alfabeta, 2016

Lampiran 1 Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pendapatan asli daerah

No	Tahun	PBB	Pajak Restoran	Pajak Reklame	PAD
2	2015	786.364.872	668.058.813	264.128.187	109.116.860.676
3	2016	1.763.926.576	688.643.543	222.428.159	125.369.467.375
4	2017	1.811.165.436	820.572.955	232.668.496	120.138.956.032
5	2018	1.718.360.997	691.632.282	268.047.661	121.316.713.328
6	2019	1.821.861.635	983.171.642	311.723.942	115.244.246.710
7	2020	1.561.620.002	628.120.579	263.784.116	123.277.867.970
Jumlah		11.802.128.972	9.463.299.518	4.480.199.814	1.562.780.561
Terendah		660.936.878	786.364.872	628.120.579	222.428.159
Tertinggi		1.821.861.635	1.821.861.635	983.171.642	311.723.942
Rata-rata		1.475.266.122	1.577.216.586	746.699.969	260.463.427
Standar Deviasi		472.320.759	398.761.913	132.683.512	31.397.001

Lampiran 2 Output SPSS

Descriptives

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PBB	6	786364872,00	1821861635,00	1577216586,3333	398761913,0529 1
P. Restoran	6	628120579,00	983171642,00	746699969,0000	132683512,2335 8
P. Reklame	6	222428159,00	311723942,00	260463426,8333	31397000,63971
PAD	6	109116860676,00	125369467375,00	119077352015,1667	5954508815,416 14
Valid N (listwise)	6				

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	P. Reklame, PBB, P. Restoran ^b		Enter

a. Dependent Variable: PAD

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,986 ^a	,973	,932	1549514810,918 58	1,876

a. Predictors: (Constant), P. Reklame, PBB, P. Restoran

b. Dependent Variable: PAD

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1724788838658 30160000,000	3	5749296128861 0054000,000	23,945	,040 ^b
	Residual	4801992298512 100400,000	2	2400996149256 050200,000		
	Total	1772808761643 42250000,000	5			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), P. Reklame, PBB, P. Restoran

Coefficients^a

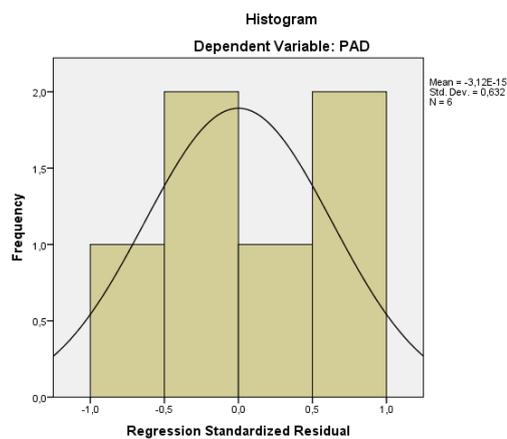
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	122014376386,818	6586214262,548		18,526	,003		
1 PBB	15,436	2,118	1,034	7,286	,018	,673	1,486
P. Restoran	-30,754	7,537	-,685	-4,081	,055	,480	2,082
P. Reklame	-16,581	28,381	-,087	-,584	,618	,605	1,654

a. Dependent Variable: PAD

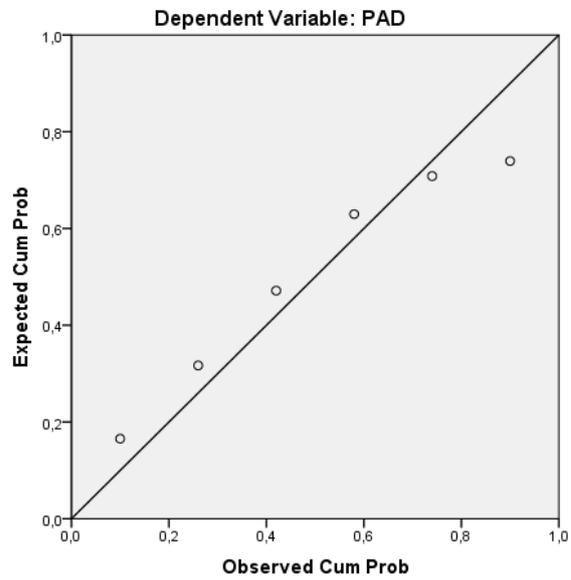
Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	PBB	P. Restoran	P. Reklame
1	1	3,946	1,000	,00	,00	,00	,00
	2	,038	10,253	,02	,63	,00	,04
	3	,013	17,702	,27	,06	,60	,00
	4	,004	31,465	,71	,31	,40	,96

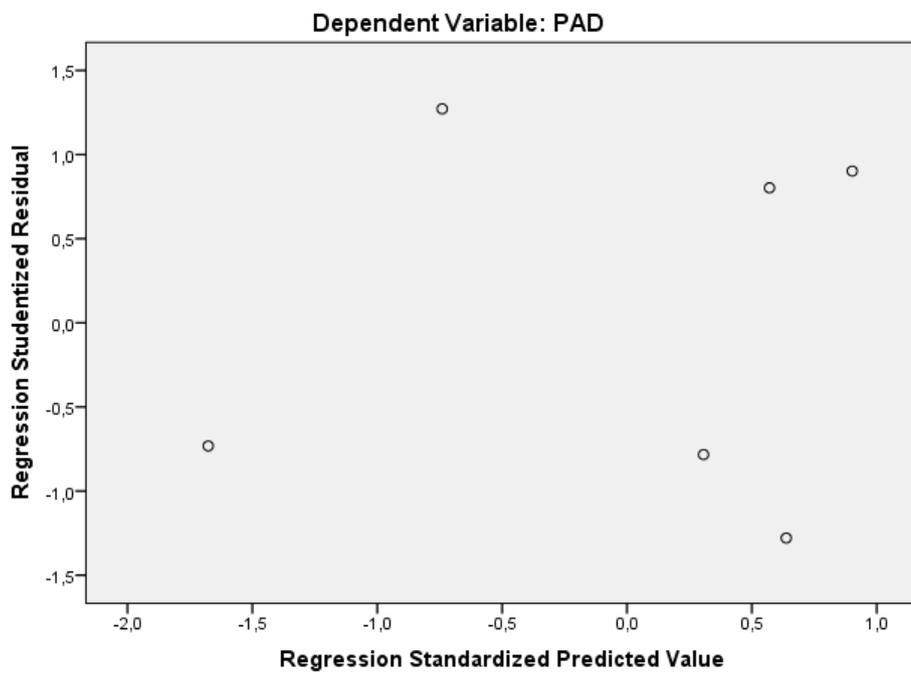
a. Dependent Variable: PAD

Charts

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot



NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		6
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0000048
	Std. Deviation	979999214,1335
	Absolute	7140
Most Extreme Differences	Positive	,200
	Negative	,155
Kolmogorov-Smirnov Z		-,200
Asymp. Sig. (2-tailed)		,489
		,971

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran 3 tabel t

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

df	Pr 0.50	0.25 0.20	0.10 0.10	0.05 0.050	0.025 0.02	0.01 0.010	0.005 0.002	0.001 0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884	
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712	
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453	
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318	
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343	
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763	
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529	
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079	
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681	
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370	
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470	
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963	
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198	
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739	
15	0.69120	1.34081	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283	
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615	
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10962	2.56693	2.89823	3.64577	
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048	
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940	
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181	
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715	
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499	
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496	
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678	
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019	
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500	
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103	
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816	
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624	
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518	
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490	
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531	
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634	
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793	

Lampiran 4 tabel F

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05															
df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.78	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.98	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00

Lampiran 5 Durbin Watson

T=14 to 100, K=2 to 21 (K <= T-4)	T=100 to 200, K=2 to 21	T=200,210,220,....,500, K=2 to 21
K includes intercept	K includes intercept	K includes intercept
T K dL dU	T K dL dU	T K dL dU
6. 3. 0.61018 1.40015	100. 2. 1.65404 1.69439	200. 2. 1.75844 1.77852
7. 2. 0.69955 1.35635	100. 3. 1.63369 1.71517	200. 3. 1.74833 1.78871
7. 3. 0.46723 1.89636	100. 4. 1.61306 1.73643	200. 4. 1.73815 1.79901
8. 2. 0.76290 1.33238	100. 5. 1.59216 1.75818	200. 5. 1.72789 1.80942
8. 3. 0.55907 1.77711	100. 6. 1.57100 1.78039	200. 6. 1.71755 1.81994
8. 4. 0.36744 2.28664	100. 7. 1.54958 1.80306	200. 7. 1.70713 1.83057
9. 2. 0.82428 1.31988	100. 8. 1.52793 1.82619	200. 8. 1.69663 1.84133
9. 3. 0.62910 1.69926	100. 9. 1.50604 1.84976	200. 9. 1.68607 1.85219
9. 4. 0.45476 2.12816	100. 10. 1.48394 1.87377	200. 10. 1.67543 1.86316
9. 5. 0.29571 2.58810	100. 11. 1.46162 1.89820	200. 11. 1.66471 1.87423
10. 2. 0.87913 1.31971	100. 12. 1.43910 1.92305	200. 12. 1.65394 1.88541
10. 3. 0.69715 1.64134	100. 13. 1.41639 1.94830	200. 13. 1.64308 1.89671
10. 4. 0.52534 2.01632	100. 14. 1.39350 1.97394	200. 14. 1.63216 1.90810
10. 5. 0.37602 2.41365	100. 15. 1.37045 1.99997	200. 15. 1.62117 1.91961
10. 6. 0.24269 2.82165	100. 16. 1.34724 2.02636	200. 16. 1.61011 1.93122
11. 2. 0.92733 1.32409	100. 17. 1.32390 2.05313	200. 17. 1.59900 1.94292
11. 3. 0.75798 1.60439	100. 18. 1.30041 2.08024	200. 18. 1.58781 1.95473
11. 4. 0.59477 1.92802	100. 19. 1.27680 2.10767	200. 19. 1.57657 1.96665
11. 5. 0.44406 2.28327	100. 20. 1.25310 2.13544	200. 20. 1.56527 1.97865
11. 6. 0.31549 2.64456	100. 21. 1.22928 2.16352	200. 21. 1.55390 1.99075
11. 7. 0.20253 3.00447	101. 2. 1.65582 1.69577	210. 2. 1.76445 1.78358
12. 2. 0.97076 1.33137	101. 3. 1.63568 1.71634	210. 3. 1.75483 1.79326
12. 3. 0.81221 1.57935	101. 4. 1.61526 1.73738	210. 4. 1.74513 1.80305
12. 4. 0.65765 1.86397	101. 5. 1.59457 1.75888	210. 5. 1.73537 1.81295
12. 5. 0.51198 2.17662	101. 6. 1.57363 1.78086	210. 6. 1.72554 1.82294
12. 6. 0.37956 2.50609	101. 7. 1.55244 1.80328	210. 7. 1.71563 1.83305
12. 7. 0.26813 2.83196	101. 8. 1.53100 1.82614	210. 8. 1.70566 1.84325
12. 8. 0.17144 3.14940	101. 9. 1.50934 1.84945	210. 9. 1.69561 1.85355
13. 2. 1.00973 1.34040	101. 10. 1.48747 1.87317	210. 10. 1.68550 1.86394
13. 3. 0.86124 1.56212	101. 11. 1.46538 1.89731	210. 11. 1.67532 1.87445
13. 4. 0.71465 1.81593	101. 12. 1.44310 1.92186	210. 12. 1.66508 1.88505

Lampiran 6 Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Rani Aprillia
2. NIM : 4022018090
3. Tmpt/Tgl Lahir : Pulau Tiga/18 April 1999
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Alamat : Dusun Wonosari Desa Perkebunan Pulau Tiga
Kecamatan Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang

II RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD Negeri 3 Pulau Tiga Berijazah tahun 2011
2. Tamatan MTsN Tamiang Hulu Berijazah tahun 2014
3. Tamatan SMA Negeri 1 Rantau Mayang Berijazah tahun 2017

III. RIWAYAT ORGANISASI

1. Pramuka tahun 2014
2. Paskibra tahun 2015-2016
3. Pencak Silat tahun 2014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh, Telepon 0641) 22619 – 23129; Faksimili(0641) 425139;
Website: www.febi.iainlangsa.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B/600/In.24/LAB/PP.00.9.06/2022

Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri

Langsa menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

NAMA : Rani Aprillia

NIM : 4022018090

PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah

JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN,
PAJAK - RESTORAN, DAN PAJAK REKLAME
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
LANGSA TAHUN 2015-2020

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 35% pada naskah skripsi yang disusun. Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti sidang munaqasyah.

Langsa, 08 Juni 2022 ^{AP}
Kepala Laboratorium FEBI


Mastura, M.E.I.
NIDN. 2013078701

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 438 TAHUN 2021
T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang perlu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam tugas tersebut;
c. Untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 12 Februari 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
8. DIPA Nomor : 025.04.2.888040/2021, Tanggal 23 November 2020.
- Memperhatikan:** Hasil Seminar Proposal Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 27 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **Zikriatul Ulya, M.Si** sebagai Pembimbing I dan **Ade Fadillah FW Pospos, MA** sebagai Pembimbing II untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa atas nama **Rani Aprillia**, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) :4022018090, dengan Judul Skripsi : **"Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa Tahun 2015-2020"**.
- Ketentuan** : a. Masa bimbingan Skripsi maksimal 1 (Satu) Tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini sampai dengan pendaftaran Sidang Munaqasyah Skripsi;
b. Masa Bimbingan kurang dari 1 (Satu) Tahun apabila masa studi telah berakhir;
c. Setiap Bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
d. Penyelesaian Skripsi yang melewati masa studi berlaku ketentuan tersendiri;
e. Masa Studi Program Strata Satu (S1) adalah 7 (Tujuh) Tahun;
f. Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II tidak diperkenankan untuk merubah judul skripsi yang telah ditetapkan dalam SK, kecuali melalui proses pembahasan ulang dan harus berkoordinasi dengan Ka. Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa;
g. Selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;
h. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
Pada Tanggal 17 November 2021 M
12 Rabiul Tsani 1443 H H



Tembusan :

1. Ketua Jurusan/Prodi Ekonomi Syariah FEBI IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.